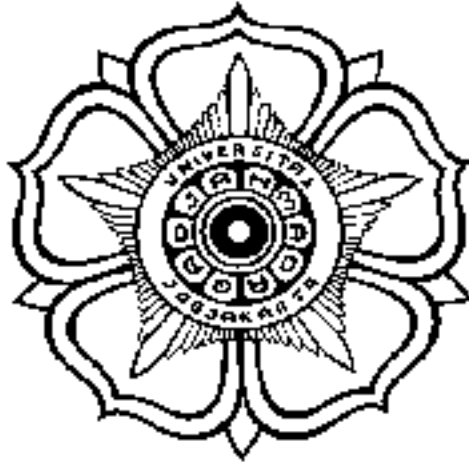


Laporan Akhir

Ruang Hidup yang Menciut

Dinamika Masyarakat Lahan Gambut di Desa Teluk Bakung,
Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya,
Kalimantan Barat dan Desa Banyubiru, Kecamatan Air
Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan



Tim Peneliti Pusat Studi Kebudayaan

Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Badan Restorasi Gambut

(BRG)

2018

ABSTRAK

Penelitian etnografi ini mencoba memahami kondisi-kondisi yang terjadi pada masyarakat di kawasan garis depan (*frontier*) Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat di tengah arus besar kuasa investasi dan eksploitasi sumber daya alam. Introduksi pembangunan dan tawaran kemakmuran merangsek terus-menerus hingga mempertaruhkan kehidupan mereka sendiri. Relasi historis mereka dengan lingkungan dan juga adalah kehidupan itu sendiri perlahan-lahan mulai meredup, tersingkirkan, terenyahkan. Kawasan gambut yang terbakar hebat pada tahun 2015 mengintroduksi upaya-upaya “pemberdayaan” dan “keinginan untuk memperbaiki” dari negara untuk merestorasi gambut dan memandirikan kehidupan ekonomi masyarakat. Introduksi tersebut hadir di tengah masyarakat yang sudah semakin luluh lantak dan terfragmentasi akibat ekspansi kuasa investasi yang mengambilalih ruang hidup masyarakat. Penelitian ini memilih dua karakteristik masyarakat yang berada di lahan gambut; *Pertama* adalah masyarakat lokal Dayak Kanayatn di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat dan *Kedua* adalah kehadiran masyarakat transmigrasi di Desa Banyubiru, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kedua karakteristik masyarakat ini menjadi representasi potret transformasi sosial budaya masyarakat yang hingga kini berada di kawasan hidrologis gambut di Indonesia. Penelitian ini berargumentasi rentang panjang eksistensi masyarakat di kawasan gambut justru semakin hari semakin terhimpit ruang-ruang hidupnya. Geliat “kebudayaan sungai” (Kapuas) yang menopang kehidupan dan menginspirasi kebudayaan dan kehidupan itu sendiri perlahan-lahan terhempas oleh “kebudayaan jalan” (trans Kalimantan) yang diangkut oleh kuasa investasi. Masyarakat terpapar transformasi yang pelik dan dituntut untuk bersikap atas perubahan tersebut. Pada sisi yang lain, ruang hidup mereka semakin terdegradasi, semakin menciut. Introduksi kuasa investasi dan upaya-upaya restorasi dari berbagai pihak justru beresiko menyederhanakan sistem sosial budaya yang menjadi tiang penyangga kehidupan mereka di hari depan. Tantangannya adalah membangun gerakan sosial berbasis inspirasi lokal untuk menegakkan kemandirian masyarakat di lahan gambut. Pada momen inilah modal sosial budaya bisa direkatkan kembali dan ruang-ruang hidup masyarakat sudah tentu bisa direbut kembali.

Kata kunci: etnografi, *frontier*, eksploitasi sumber daya alam, fragmentasi, kuasa investasi, transformasi, kawasan gambut, gerakan sosial, modal sosial

1. PENDAHULUAN

Seluk-beluk kehidupan masyarakat kerap jauh lebih kompleks dari apa yang dibayangkan oleh banyak pihak. Karena di satu sisi, masyarakat adalah satuan sosial yang irama hidupnya terus berubah, dan pada sisi yang lain selalu ada bias yang sukar dihindari, yaitu antara posisi seorang pengamat dan pelaku (dalam hal ini masyarakat itu sendiri). Pada konteks yang lain, bias ini pula yang dijumpai ketika menyaksikan historisitas berbagai upaya pemakmuran (baca: program pembangunan) yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dan atau pemangku kebijakan, yang pada kenyataannya kerap tidak selalu seirama dengan apa yang menjadi kehendak masyarakat – yang dijadikan sebagai “obyek” dari kebijakan.

Dalam buku *The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan dan Pembangunan di Indonesia*, Tania Murray Li (2012) dengan tajam menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi terkait dengan masalah pembangunan selama ini lebih banyak dilatarbelakangi oleh adanya benturan “kehendak untuk memperbaiki” yang berasal dari pemangku kepentingan, baik itu dari pemerintah, akademisi, LSM, atau juga wali masyarakat. Pada tulisan lain, Tania Li juga mengungkapkan bahwa selama ini “daerah pedalaman di Indonesia telah didefinisikan, dibentuk, dibayangkan, dikelola, dikendalikan, dieksploitasi dan “dibangun” melalui berbagai wacana dan praktik, yang berlangsung melalui karya akademik, kebijakan pemerintah, aktivisme nasional dan internasional, dan pemahaman masyarakat awam (Tania Li, 2002: 3).

Jika dicermati, pernyataan Tania Li tersebut berupaya menunjukkan titik refleksi, dengan menampilkan aspek sejarah, relasi pengetahuan, kekuasaan dan produksi, dalam melihat masyarakat yang hingga kini masih juga ditemui anggapan tentang mereka yang terasing/tertinggal/tradisional/tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang ekologi, misalnya. Dampak dari persepsi semacam ini bukan saja keliru, tetapi juga bisa berakibat fatal karena mengindikasikan adanya hasrat penaklukan dari sistem pengetahuan yang dimiliki oleh ahli pembangunan terhadap sistem pengetahuan masyarakat tempatan. Modalitas sosial dan budaya masyarakat tempatan

“dipasifkan” sedemikian rupa, takluk oleh datangnya ide-ide pemakmuran yang dilegitimasi berbagai peraturan perundang-undangan.

Pada diskusi antropologi, jauh-jauh hari gagasan senada sebetulnya juga sudah pernah diungkapkan oleh Michael R.Dove (1985) yang mengungkapkan: “Di Indonesia, sebagaimana di banyak negara sedang berkembang lainnya, pembangunan diartikan sebagai perubahan yang dikehendaki dan dibutuhkan. Apa saja yang dianggap kuno dan tidak mengalami perubahan dengan sendirinya akan dianggap sebagai keterbelakangan. Secara khusus ini diterapkan pada kebudayaan. Kebudayaan dan gaya hidup tradisional itu juga dianggap sebagai penghalang besar bagi pembangunan sosio-ekonomi. Karena itu, dalam perencanaan pembangunan, salah-satu hal yang diusahakan adalah dengan mengutuk dan mengubah, bahkan menyingkirkan kebudayaan tradisional itu,” tulisnya.

Belakangan, tulisan Iwan Meulia Pirous yang terbit di kolom Kompas memberi kesaksian tentang itu. Dalam ulasan berjudul “Kerentanan akibat Larangan Bakar Lahan” 29 Maret 2018, ia menceritakan tingginya biaya sosial yang mesti ditanggung oleh masyarakat lokal lantaran Instruksi Presiden Nomor 11/2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan – yang menurutnya, jadi landasan dari larangan membakar lahan yang tidak membedakan antara api yang berada di kawasan lahan gambut dan api yang berada di kawasan tanah mineral, yaitu tanah yang dimiliki oleh warga sendiri dan biasa digunakan untuk berladang. Hal ini mengakibatkan tradisi masyarakat peladang berpindah (*swidden agriculture peasant*) di Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat terputus, yang kemudian membuat daya subsistensi menurun. Dari yang semula mampu mencukupi kebutuhan hidup dari hasil bumi di ladangnya sendiri, kini mesti keluar uang untuk mencukupi kebutuhan. Sehingga produktifitas lahan pun menurun diikuti dengan meningkatnya konsumsi masyarakat akan kebutuhan yang disediakan oleh pasar.

Oleh sebab itulah penelitian ini memfokuskan menggali dua poin penting yang mencoba membentangkan potret sejarah dan transformasi sosial dinamika masyarakat di lahan gambut.

1. *Konteks historis dan relasi-relasi sosial* mengelaborasi sejarah eksistensi komunitas di dua KHG Sungai Ambawang dan Sungai Sugihan. Komunitas masyarakat di lahan gambut tersebut mempunyai relasi sosio-historis dengan lingkungan alamnya (kawasan gambut). Dalam dinamika relasi sosio-historis itulah yang menciptakan nilai-nilai dan pengetahuan budaya yang terbukti hidup dan dipraktikkan dalam keberlangsungan hidup mereka.
2. *Introduksi modernitas dan transformasi sosial budaya* mendalami dinamika situasi kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat di lahan gambut. Salah satu yang menjadi pusat perhatian adalah kuasa investasi global seperti perusahaan sawit, *pulp and paper*, dan para pengusaha lokal yang hadir di wilayah mereka. Hidup menjadi berubah begitu cepat. Efek-efek relasi mereka dengan “dunia baru” tersebut mereproduksi beragam narasi dan kemungkinan-kemungkinan perubahan kehidupan.

2. METODE DAN TEMA-TEMA PENTING

Penelitian ini adalah kajian etnografi yang menyandarkan diri pada data-data kualitatif melalui kerja lapangan etnografi terfokus. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- *Observasi* adalah langkah awal untuk mengidentifikasi secara langsung kondisi lapangan penelitian.
- *Wawancara Mendalam* dimaksudkan untuk mendapatkan data yang lebih rinci. Untuk memperkaya data, teknik *snowball* juga diterapkan supaya bisa mendapatkan kedalaman data dari informan berdasarkan sudut pandang pengetahuan tineliti (*emic*).
- *Studi Kasus* berguna sebagai eksplorasi lebih lanjut mengenai peristiwa, aktivitas, atau kehidupan individu dan masyarakat yang terjadi di lokasi penelitian.

- *Studi Pustaka* menjadi sumber data yang tak kalah pentingnya untuk memahami konteks dan pembangunan narasi etnografi.

Tema-tema Penting

Berikut beberapa yang dielaborasi dalam laporan ini.

1. Kronologi Sejarah dan Perkembangan Wilayah

Hal ini bertujuan untuk mengetahui etnohistori masyarakat di lokasi yang nantinya akan dipilih. Dengan menelusuri momentum historis yang jadi penanda perubahan lingkungan, kehidupan sosial, ekonomi dan politik di wilayah tersebut.

2. Monografi, Sosial-Budaya dan Ekonomi

- *Profil Monografi*: untuk memberi gambaran konteks sosial, seperti jumlah penduduk sebagai ukuran kepadatan penduduk yang terbagi menurut jenis kelamin, suku, agama, kategori warga produktif dan non-produktif, serta pola mata pencahariannya.
- *Potret Sosial*: untuk menggambarkan dinamika sosial, pola kepemimpinan, perkawinan, kepemilikan tanah, organisasi kekerabatan dan organisasi sosial, tradisi setempat yang di dalamnya meliputi konstruksi kearifan lokal (*local wisdom*) dalam pengelolaan kehidupan masyarakat dan alam yang serasi, keberadaan nilai luhur (*value system*) dalam masyarakat, model-model partisipasi masyarakat, serta mekanisme penyelesaian konflik.
- *Potret Ekonomi*: untuk menggambarkan aspek yang lebih luas meliputi kegiatan utama penduduk, sumber-sumber mata pencaharian masyarakat, perkembangan sektor pertanian dan perikanan, perdagangan dan jasa, pengembangan usaha (koperasi, UKM), keberadaan fasilitas ekonomi (bank dan pasar) dan potensi kepariwisataan.

3. Pemetaan Tokoh dan Kelompok Masyarakat

Pemetaan ini berhubungan dengan pemangku kepentingan, baik perorangan, kelompok ataupun lembaga. Di dalamnya mencakup pemetaan peran di

masyarakat baik formal dan non-formal, berbagai kepentingan dan kekuasaan yang bersinggungan dengan kehidupan masyarakat, pola penguasaan terhadap sumberdaya dan perumusan kebijakan yang terkait dengan aktivitas kehidupan masyarakat. Data ini juga akan meliputi peta aktor pemangku kepentingan, dinamika politik lokal, gambaran kekuatan setiap aktor dan pola relasi dan jaringan antar aktor.

4. *Program dan Project*

Penggambaran ini berhubungan dengan program dan project yang sudah dan sedang dilakukan di wilayah penelitian. Perhatian utama adalah kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan, serta pemberdayaan yang ditujukan kepada masyarakat. Tujuan, dampak, tantangan dan keberlanjutan dalam pelaksanaannya menjadi sesuatu yang perlu untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi.

5. *Persepsi Masyarakat terhadap Lingkungan*

Menyuguhkan bagaimana pandangan masyarakat (*emic*) terhadap lingkungan, mereka dengan alam, bagaimana masyarakat memaknai lingkungan ruang hidupnya.

3. KONTEKS: MANUSIA DAN RUANG-RUANG EKOLOGINYA

Relasi manusia dengan lingkungan sekitarnya berimplikasi penting dalam konstruksi kebudayaan dan peradaban manusia. Oleh sebab itulah begitu banyak pengetahuan lokal masyarakat yang tercipta hasil dari relasi manusia dengan lingkungan alamnya. Ilmu ekologi, yang mempertemukan manusia dengan alam, melibatkan totalitas imajinasi, pengetahuan, maupun politik pemanfaatan (baca: eksploitasi) terhadap kekayaan alam untuk kemakmuran manusia. Pada titik inilah peran sentral manusia dalam dinamika hubungan dengan lingkungan alamnya menjadi penting untuk dicermati.

Jika menengok kajian akademik, fokus tentang relasi manusia dengan lingkungannya sebenarnya memiliki sejarah yang panjang. Sejarah itu berawal dari

kajian yang fokus terhadap pengetahuan manusia tentang biologi termasuk di dalamnya pengetahuan tentang tetumbuhan (*botani*), hewan (*zoology*) dari lingkungan alam. Oleh sebab itulah kemudian disebut dengan etnobiologi. Kajian etnobiologi telah menjadi suatu kajian lintas disiplin yang khas dan luas, baik secara teori maupun praktik. Misalnya kajian tentang jenis-jenis tumbuhan obat dan pengobatan tradisional, sistem keberlanjutan sumber daya alam, bencana alam. Perkembangan terkini biologi tidak lagi mengkaji sekadar aspek-aspek biologi atau social penduduk secara parsial, tapi kini kajian etnobiologi umumnya dilakukan secara holistik.

Kajian holistik yang dimaksudkan adalah kajian aspek-aspek sosial penduduk yang terintegrasi dengan sistem ekologi. Hal ini disebabkan karena dalam pengkajian pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, seperti flora, fauna, dan ekosistem lokal yang dilakukan oleh masyarakat lokal menyangkut aspek-aspek sistem sosial dan ekosistem yang terintegrasi. Pemanfaatan sumber daya alam yang terintegrasi dengan sistem sosial masyarakat diantaranya berhubungan dengan faktor pengetahuan lokal, pemahaman kepercayaan, persepsi dan *world view* (pandangan tentang dunia), bahasa lokal, pemilikan/penguasaan sumber daya lahan, sistem ekonomi dan teknologi, institusi sosial, serta aspek-aspek ekologis seperti biodiversitas, pengelolaan adaptif, dan penggunaan sumber daya alam berkelanjutan (Iskandar, 2016: 27-28).

Masyarakat tradisional dengan modal pengetahuan lokalnya, seperti pengetahuan biologi lokal telah mampu dan berhasil melindungi proses-proses ekologi potensial, melindungi aneka ragam spesies atau varietas tumbuhan dan hewan beserta ekosistemnya untuk kepentingan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Pengetahuan lokal merupakan kajian utama etnobiologi sejak tahun 1990-an dan dimanfaatkan bagi berbagai program pembangunan misalnya dalam bidang pengobatan, pertanian, peternakan, kehutanan, dan konservasi alam serta keanekaragaman hayati.

Iskandar (2016) memberikan gambaran rinci tentang sejarah perkembangan etnobiologi yang terdiri dari tiga fase. Fase *Pertama*, adalah periode 1870-an – 1950-an dimana kajian etnobiologi bersifat elementer. Pada masa itu sejatinya kajian etnobiologi lebih fokus pada hubungan antara ‘penduduk pribumi’ (*indigenous people*) atau ‘penduduk tradisional’ dengan jenis-jenis tumbuhan dan binatang. Salah satu contohnya adalah kajian tentang nama-nama jenis tumbuhan dan binatang berserta penggunaannya oleh masyarakat tradisional non-Barat. Kajian tersebut kerap juga dinamakan sebagai deskripsi pengetahuan biologi oleh ‘penduduk primitif’.

Kajian etnobiologi berkembang antara lain juga melalui sejarah berbagai penjelajahan orang-orang Eropa, seperti penjelajahan Christopher Columbus (1492-1620) ke berbagai negara di luar Eropa, seperti Bahama, Kuba dan lainnya di masa silam. Mereka inilah yang melakukan pengamatan dan pendokumentasian aneka ragam penggunaan jenis-jenis tumbuhan dan hewan oleh berbagai kelompok penduduk tradisional, sehingga berkembangnya ilmu pengetahuan baru yang dinamakan etnobotani yang pertama kali didefinisikan oleh Hersberger pada 1895.

Fase *kedua* yaitu pada tahun 1950-1990-an, perkembangan etnobiologi lebih terfokus pada studi konsepsi manusia dan klasifikasi mengenai alam, suatu perkembangan sejalan dengan studi dari Harold Conklin tahun 1954. Pada tahun ini juga Conklin juga memperkenalkan istilah ‘etnoekologi’. Istilah ini berawal dari makalah yang mendiskusikan dan mengkritik pandangan umum masyarakat luas yang memandang negative terhadap system ladang berpindah (*swidden cultivation*). Pada umumnya sistem ladang berpindah dipandang orang luar sebagai pekerjaan serampangan, merusak lingkungan, ilegal dan ‘cara primitif’ masyarakat tradisional dalam menggarap lahan demi menopang kehidupannya. Padahal faktanya menurut Conklin, sistem perladangan berpindah tersebut dikelola masyarakat tradisional dengan berlandaskan pengetahuan lokal yang mendalam. Awalan ‘etno’ menjadi suatu kajian disiplin ilmu dengan pendekatan dari sudut pandangan penduduk lokal yang dikaji (pendangan emik) dan dievaluasi oleh sudut pandang orang luar peneliti dari aspek disiplin ilmu barat (pendangan *etik*).

Salah satu contohnya adalah etnobotani yang merupakan kajian dari sudut pandang penduduk lokal (*emik*), dengan dikaji oleh seorang peneliti (pandangan *etik*). Dengan kata lain, etnobotani merupakan evaluasi ilmiah terhadap pengetahuan penduduk mengenai botani. Coklin juga mengembangkan kajian yang kemudian dinamakan etnoekologi. Pada kajian etnoekologi ini, di antaranya mengkaji dan mendokumentasikan tentang sistem klasifikasi dan penduduk lokal (*folk classification system*). Misalnya adalah klasifikasi penduduk lokal tentang berbagai jenis tumbuhan, binatang, dan tanah air (Iskandar, 2016: 29).

Fase *ketiga* adalah setelah tahun 1990-an. Perkembangan etnobiologi lebih pesat dengan perkembangan analisisnya bersifat narasi dengan mendeskripsikan obyek kajian secara cermat. Pada umumnya dalam studi lapangan etnobiologi banyak menyerupai tata kerja dari teknik etnografi, seperti dengan teknik wawancara dengan informan penduduk tradisional dan teknik observasi partisipasi dalam berbagai kegiatan penduduk local atau penduduk tradisional. Selain itu kajian etnobiologi juga mempunyai teknik pengumpulan data lapangan bidang biologi ekologi seperti mengidentifikasi jenis-jenis tumbuhan, jenis-jenis hewan dan membuat petak-petak analisis vegetasi hutan. Berbagai pengetahuan tradisional telah banyak menjadi fokus dalam kajian etnobiologi sejak tahun 1990-an. Kajian etnobiologi tersebut telah banyak dikaji dan dimanfaatkan untuk berbagai program pembangunan, misalnya bidang pengobatan, pertanian, peternakan, kehutanan, dan konservasi keanekaragaman hayati (Iskandar, 2016: 30).

Pada dasarnya penting untuk melibatkan penduduk setempat secara aktif dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Hal tersebut sangat sejalan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan, yaitu pro-lapangan kerja, pro-rakyat miskin, pro-gender dan pro-lingkungan hidup. Konsep luas perkembangan etnobiologi yang memberikan perhatian pada lingkungan secara luas inilah yang dinamakan etnoekologi.

Etnoekologi memiliki potensi yang besar berkembang di Indonesia karena keanekaragaman ekosistem, baik ekosistem alami maupun ekosistem binaan. Pada

dasarnya aneka ragam ekosistem tersebut dapat dibedakan pula dalam dua kategori utama yaitu ekosistem darat (ekosistem terrestrial) dan ekosistem perairan tawar dan bahari (ekosistem akuatik). Ditilik dari kategori tersebut, paling tidak di Indonesia memiliki 47 tipe ekosistem alami terestial yang membentang dari pesisir hingga wilayah pegunungan tinggi. Dalam hal kekayaan hayati, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara “megadiversiti” yaitu negara yang memiliki keanekaan hayati yang tinggi di dunia. Berdasarkan keragaman tumbuhan (flora) di Indonesia, negara Indonesia yang termasuk kawasan di Melanesia mempunyai ragam tumbuhan yang sangat tinggi (Iskandar, 2016: 31-32).

Sama halnya dengan keanekaan jenis tumbuhan, ditilik dari keaneragaman hewan, Indonesia juga memiliki keanekaragaman hewan yang tinggi. Misalnya, Indonesia merupakan negara terbanyak memiliki jenis mamalia di dunia (515 jenis). Keanekaan jenis burung di Indonesia telah tercatat 1519 jenis, merupakan negara yang memiliki keanekaan burung nomor empat, setelah Kolombia (1721 jenis), Peru (1701) dan Brazil (1622 jenis). Sementara itu, jenis reptilian di Indonesia tercatat (600 jenis), emrupakan peringkat ketiga di dunia, setelah Meksiko (717 jenis) dan Australia (686 jenis).

Indonesia selain memiliki keanekaan ekosistem dan keanekaragaman hayati, juga memiliki keanekaan atau kebinekaan suku bangsa dan bahasa. Indonesia telah tercatat memiliki lebih dari 300 kelompok etnik. Aneka ragam kelompok etnik tersebut bermukim berbagai lokasi geografis dan ekosistem, seperti lingkungan pesisir dan pedalaman atau perairan daratan. Sementara itu berdasarkan bentuk mata pencahariannya berbagai etnik tersebut dapat dibedakan menjadi lingkungan sosial

pemburu peramu, nelayan, berladang berpindah-pindah atau berladang berotasi, petani menetap serta industri dan jasa.¹

Pada umumnya tiap suku di Indonesia memiliki bahasa lokal atau bahasa ibu yang berbeda-beda mengingat Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa, maka tidaklah heran di Indonesia memiliki sekurangnya 655 bahasa lokal atau bahasa ibu. Jumlah bahasa lokal tersebut menempati peringkat kedua dari 25 negara di dunia yang memiliki bahasa keanekaan bahasa lokal endemik setelah Papua Nieuw Guinea. Dengan kekayaan bahasa lokal tersebut menyebabkan berbagai kelompok etnik memiliki kemampuan untuk berpikir secara sistematis dan teratur serta berkembangnya aneka ragam pengetahuan lokal. Misalnya adalah pengetahuan lokal tentang botani, seperti pengenalan jenis-jenis tumbuhan, pemanfaatan dan pengelolaannya. Pengetahuan penduduk tentang ekologi pertanian atau agroekosistem, seperti pengelolaan berbagai agroforestri tradisional. Selain itu, beberapa kelompok etnik di Indonesia juga telah memiliki pengetahuan lokal untuk mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan. Tidak hanya itu, beberapa kelompok masyarakat lokal dengan berbekal pengetahuan lokalnya telah mampu mengelola sumber daya alamnya secara berkelanjutan (Iskandar, 2016: 33-34).

Kajian akademik telah memberikan peta yang terang benderang tentang pentingnya mencermati pengetahuan masyarakat lokal tentang lingkungan alamnya. Ruang-ruang ekologi tersebut adalah kehidupan sekaligus juga identitas masyarakat lokal. Pengetahuan lokal tersebut bisa menjadi modal sosial untuk berefleksi dan bersikap di tengah perubahan sosial yang mendesak mereka. Tentu ini bukan hal mudah.

¹ Keseluruhan bahan dari sub-bab ini disadur dari Iskandar, Johan. 2016. "Etnobiologi dan Keragaman Budaya di Indonesia" dalam *Jurnal Umbara: Indonesian Journal of Anthropology*, Jurusan Antropologi Universitas Padjajaran Bandung, Vol 1 (1) Juli 2016.

4. PENYINGKIRAN-PENYINGKIRAN

Sejarah panjang relasi timpang kuasa investasi global dengan masyarakat lokal menjadikan ruang-ruang ekologi masyarakat hilang dikubur perusahaan sawit, diterabas perusahaan kayu, bahkan digusur untuk perumahan para pekerja. Tidak ada yang mempedulikan. Akar sejarahnya adalah ketidakjelasan penguasaan mereka terhadap tanah yang menjadi pondasi dan pertahan terakhir kehidupan mereka. Bisa dibayangkan bagaimana kelangsungan hidup mereka tanpa adanya penguasaan yang jelas atas tanah yang menyertai kelahiran, kehidupan, dan kematian kelak.

Rahman (2015:33) mengungkapkan bahwa pola-pola penyingkiran tersebut menjadi keseharian masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. Ia dengan mengutip laporan dari Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2014 saja sedikitnya telah terjadi 472 konflik agraria di seluruh Indonesia dengan luasan konflik mencapai 2.860.977,07 hektar. Konflik-konflik ini melibatkan sedikitnya 105.887 Kepala Keluarga (KK). Data KPA memperlihatkan konflik agraria tertinggi pada tahun ini terjadi pada proyek-proyek infrastruktur, yaitu sebanyak 215 konflik agraria (45,55%). Selanjutnya ekspansi perluasan perkebunan skala besar menempati posisi kedua yaitu 185 konflik agrarian (39,19%), dilanjutkan oleh sektor kehutanan 27 kasus (5,72%), pertanian 20 (4,24%), pertambangan 14 (2,97%), perairan dan kelautan 4 (0,85%) dan lain-lainnya ada 7 konflik (1,4%).

Konflik yang disebutkan di atas tersebut akan terus-menerus meningkat seiring dengan masifnya perluasan kapitalisme melalui investasi. Sistem produksi kapitalisme ini menyebabkan porak-porandanya kehidupan rakyat dan tanah air yang berlangsung sistemik. Dalam proses penghancuran itulah dibutuhkan reorganisasi ruang untuk perluasan sistem produksi kapitalisme yang menghasilkan komoditas-komoditas global demi penciptaan keuntungan dan akumulasi modal perusahaan-perusahaan raksasa. Reorganisasi ruang tersebut termanifestasikan dalam berbagai bentuk ekspansi perusahaan-perusahaan berskala trans-nasional yang menyerobot tanah-tanah masyarakat lokal dengan perlindungan negara dan aparat keamanan.

Kelompok-kelompok rakyat miskin di banyak desa, di pinggir kota, di dataran tinggi, di pedalaman, maupun di pesisir dari pulau-pulau, dilanda rasa risau dan kuatir sehubungan dengan ketidakpastian hak atas tanah, sumber daya alam, dan wilayah kelola kepunyaannya. Mereka adalah korban-korban operasi paksa pelepasan hubungan kepemilikan rakyat terhadap tanah, sumber daya alam dan wilayah, yang pada gilirannya berakibat lanjutan berupa perubahan drastis tata guna dari tanah, sumber daya alam dan wilayah, serta perubahan posisi kelas dari rakyat dalam hubungannya dengan keberadaan sistem produksi baru yang berdiri dan bekerja atas tanah, sumber daya alam dan wilayah itu.

Kebanyakan rakyat mengalah dan kalah dalam hubungan tersebut. Mereka menyingkir atau meninggalkan kampung halamannya karena tidak lagi bisa mengandalkan hidup dari tanah, sumber daya alam, dan wilayah yang telah dikapling perusahaan-perusahaan. Ada sedikit saja rakyat yang berhasil mempertahankan diri dan menghalau perusahaan-perusahaan yang mengkapling tanah-tanah mereka itu. Pola penyingkiran ini berlangsung terus-menerus tanpa adanya pemihakan dari negara. Beberapa LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) melakukan advokasi dan mencoba berjuang untuk mempertahankan posisi masyarakat yang sudah “kalah” sejak awal.

Penyingkiran manusia dalam ruang-ruang ekologi tersebut berada dalam naungan rancangan besar kapitalisasi, untuk kemudian memudahkan masuknya mesin kuasa kapital berbentuk perusahaan-perusahaan yang mengeruk kekayaan sumber daya alam masyarakat. Penguasaan sumber daya alam tersebut mendapatkan dukungan kaki-kaki tangan lokal yang merupakan masyarakat di kampung-kampung yang membutuhkan uang untuk kelangsungan kehidupan mereka. Tanpa berpikir panjang mereka dengan sangat gampang untuk menjadi pemburu dan pegawai sensor kayu untuk kemudian dijual kepada para bos mereka yang berada di kota.

Rahman (2015:33-37) dengan mengutip Fernand Braudel mengungkapkan: “manakala kapitalisme diusir keluar dari pintu, ia akan masuk kembali lewat jendela.” Braudel melanjutkan, “suka atau tidak,...terdapat suatu bentuk kegiatan ekonomi

yang tak bisa dihindari memanggil ingatan kita pada kata ini dan tidak bisa tidak.” Kapitalisme adalah suatu sistem produksi yang mendasarkan pada pemisahan antara pemilik dan pekerja, serta manajer pengelola produksi, dan yang senantiasa berorientasi untuk melipatgandakan keuntungan si pemilik. Mesin-mesin produksinya harus terus bergerak memproduksi tidak henti-henti untuk menghasilkan komoditi atau barang dagangan secara standar dan massal. Barang dagangan atau komoditi itu kemudian disirkulasikan sedemikian rupa lewat berbagai rantai distribusi sehingga bisa sampai pada konsumen.

Dorongan pokok yang membentuk dan menggerakkan mesin kapitalis sesungguhnya berasal dari kemampuannya membuat rakyat mengkonsumsi barang-barang yang baru, yang kemudian melalui cara-cara produksi baru, transportasi baru, pasar-pasar baru, dan manajemen organisasi industrial baru. Barang-barang dagangan selalu harus dibeli dan rakyat dipacu untuk terus menjadi konsumen belaka. Mekanisme-mekanisme baru untuk memperbesar konsumsi terus-menerus diperbaharui, yang lama diganti dan yang baru diciptakan. Kapitalisme akan mati bila tidak ada yang membeli barang dagangan (komoditi) yang mereka hasilkan. Dari hari ke hari, sistem produksi kapitalis terus-menerus menghasilkan barang-barang baru, termasuk untuk menggantikan barang-barang dagangan yang dihasilkan oleh sistem produksi non-kapitalis. Selera rakyat dibentuk melalui iklan dan gaya hidup konsumtif yang mampu membangkitkan gairah mengidamkan dan membeli barang-barang baru (Rahman, 2015:33-37).

Perusahaan-perusahaan raksasa di bidang industri pertambangan, kehutanan, perkebunan, manufaktur, perumahan dan turisme, infrastruktur, dan lainnya, bekerja berdasarkan lisensi atau surat izin yang diperoleh dari pejabat publik yang berwenang. Lisensi-lisensi itu menjadi alas hukum untuk menyingkirkan dan meminggirkan rakyat agraris (petani, nelayan, masyarakat adat yang mengumpulkan hasil hutan/laut dan sebagainya) dari tanah dan ruang hidupnya, baik oleh perusahaan-perusahaan pemegang lisensi itu, maupun aparaturnya keamanan/polisi yang bekerja untuk perusahaan-perusahaan pemegang lisensi tersebut. Konsesi-konsesi

berupa taman-taman nasional dan kawasan konservasi lainnya, yang dihasilkan oleh keputusan-keputusan Menteri Kehutanan, juga menjadi dasar penyingkiran rakyat atas nama *biodiversity hotspot*, di mana spesies-spesies flora dan fauna yang langka dan ekosistemnya perlu dikonservasi.

Saat ini yang paling massif dilakukan pemerintah adalah pembangunan berbagai mega proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan, pelabuhan, lapangan terbang beserta *aerocity*, kompleks industri pengolahan, dan yang lainnya. Infrastruktur memiliki kunci khusus melayani komoditas untuk bersirkulasi, khususnya dengan jalan darat atau kereta api, pelabuhan, dan bandara udara. Komoditas ditransportasikan dari satu tempat ke tempat lainnya hingga sampai ke konsumen. Proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang massif ini ikut menyumbang juga pada penyingkiran rakyat dari kampung halamannya (Rachman, 2015: 33-37).

Jika kita melihat ke belakang, genealogi penyingkiran rakyat dimulai pada saat rezim penguasa Orde Baru melalui bidang-bidang pemerintahan pusat mengkapling-kapling tanah air Indonesia untuk konsesi pertambangan, kehutanan dan perkebunan, dan mengeluarkan paksa penduduk yang hidup di dalam konsesi tersebut. Tiap-tiap rezim kebijakan dari badan pemerintah pusat memiliki instrument hukum dan birokrasi pemberian lisensi yang berbeda-beda. Nama, definisi, dan bentuk dari lisensi-lisensi itu berubah-dari waktu ke waktu, sesuai dengan keperluan perusahaan untuk mengakumulasikan kekayaan, karakteristik sumber daya alam yang disasar, dan rancangan pemerintah untuk mengkomodifikasikan atau mengkonversi sumber daya alam.

Wilayah-wilayah rakyat yang masuk dalam tanah Negara atau kawasan hutan Negara nasibnya bergantung pada kelompok kategori di mana wilayah rakyat itu berada, dan lisensi-lisensi yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan yang mencakup atau mengenai wilayah rakyat itu. Konflik-konflik agraria struktural muncul ketika rakyat menolak disingkirkan oleh perusahaan pemegang izin dan melakukan perlawanan secara terus-menerus. Konflik-konflik ini merebak di mana-mana dan

menjadi kronis, karena pemerintah terus saja berfungsi melayani dan melindungi kepentingan-kepentingan perusahaan dan tidak ada mekanisme penyelesaian konflik yang tepat untuk menjamin tercapainya keadilan agraria.

Pada titik inilah hubungan dan cara penduduk menikmati hasil dari tanah airnya telah diputus melalui pemberlakuan hukum, penggunaan kekerasan, pengkaplingan wilayah secara fisik, hingga penggunaan wacana dan simbol-simbol baru yang menunjukkan status kepemilikan yang bukan lagi dipunyai rakyat. Pengkaplingan-pengkaplingan dan pemutusan hubungan kepemilikan rakyat dengan tanah airnya itu pada intinya adalah penghentian secara paksa akses masyarakat atas tanah dan kekayaan alamnya.

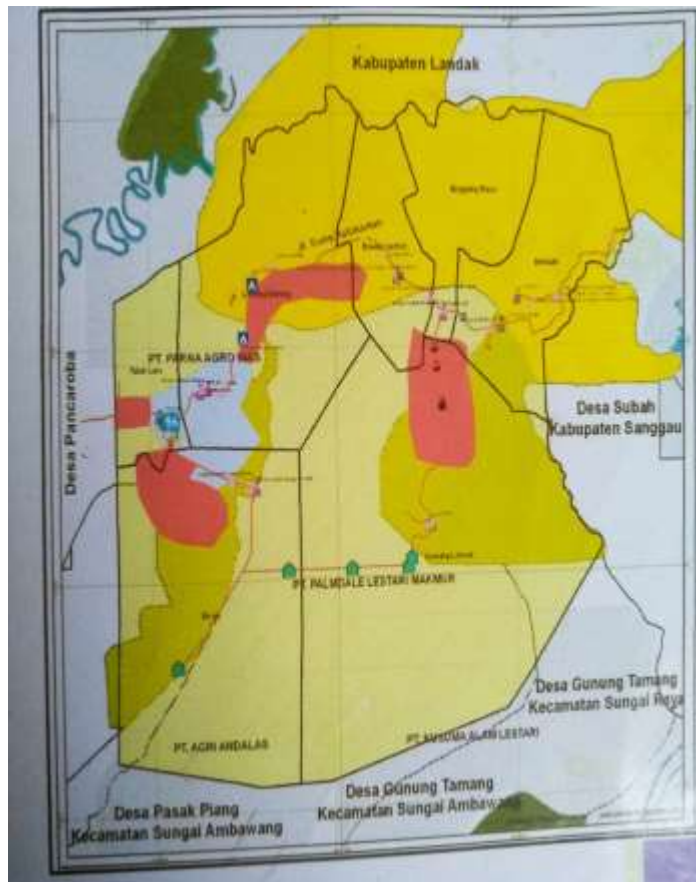
Tanah dan kekayaan alam tersebut kemudian masuk ke dalam modal perusahaan-perusahaan kapitalistik. Jadi, perubahan dari alam menjadi “sumber daya alam” ini berakibat sangat pahit bagi rakyat yang harus tersingkir dari tanah airnya dan sebagian dipaksa berubah menjadi tenaga kerja/buruh upahan. Ini adalah proses paksa menciptakan orang-orang yang tidak lagi bekerja dan hidup di tanah airnya. Orang-orang ini akan mengandalkan hanya pada tenaga yang melekat pada dirinya saja, lalu menjadi para pekerja bebas. Sebagian mereka pergi dari tanah mereka di desa-desa ke kota-kota untuk mendapatkan pekerjaan. Kantung-kantung kemiskinan di kota-kota paska-kolonial, yang dijuluki *planet of slums*, banyak dilahirkan dari proses seperti ini (Rachman, 2015: 41-42).

5. MASYARAKAT YANG MEMUNGGUNGI SUNGAI

Jalan Trans Kalimantan membelah peradaban sungai di Desa Teluk Bakung, Sungai Ambawang. Kami menginap di rumah seorang aktivis desa di Dusun Teluk Lais. Kawasan Sungai Ambawang adalah salah satu yang masuk ke dalam Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) Sungai Ambawang. Dusun ini terletak di ujung muara Sungai Ambawang. Di antara desa-desa lain, Teluk Bakung memiliki luas kawasan gambut yang paling besar. Di desa ini pula bermukim empat industri ekstraktif, tiga di antaranya adalah perusahaan sawit dan satunya lagi adalah perusahaan HTI yang

ditanami pohon akasia. Keempat nama perusahaan itu adalah PT.Kars, KSP (Akasia), PT.Palm, dan PT.Gan.

Mayoritas warga di Desa Teluk Bakung beretnis Dayak Kanayatn, satu dari ratusan sub-suku yang mendiami Pulau Kalimantan. Nama Kanayatn sendiri, menurut sumber yang pernah kami baca menyebutkan, dalam bahasa Sansekerta, berasal dari kata “Kana” (sana), “Yana” (jalan) dan “Yani” (sungai). Bila terjemahan ini tepat, maka ia sekaligus menggambarkan betapa dekatnya kosmologi orang Dayak Kanayatn dengan lanskap aliran sungai. Kosmologi sungai dan perubahan sosial warga Dayak Ahe’ ini yang selanjutnya coba diuraikan pada bagian ini, dengan mengonstruksi keterangan sejarah lisan setempat untuk menggambarkan sejarah agraria.



Keterangan gambar: Peta Desa Teluk Bakung, Sungai Ambawang (foto: Rio Belvage).

Peta yang ditampilkan di atas menunjukkan bahwa Desa Teluk Bakung berada di ujung Kabupaten Kubu Raya, yang meski berbeda secara administratif dengan wilayah kabupaten tetangga, namun masih memiliki corak budaya yang sama. Mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat beretnis Dayak Kanayatn, yang secara lebih spesifik, disebut Dayak Ahe' – demikian warga setempat menjuluki dirinya – merujuk pada bahasa ibu di sana. Luasan daerah ini pula yang mendorong para elit desa/wali masyarakat pada beberapa tahun belakangan mengusulkan pemekaran.

“Desa ini terlalu besar. Lima kali luas kota Pontianak. Makannya saya setuju kalau dimekarkan, supaya pembangunan bisa lebih cepat dilaksanakan dan merata,” kata Kepala Desa Teluk Bakung yang telah dua periode menjabat ketika suatu kali kami berbincang dengannya.

Di Desa Teluk Bakung dan juga di desa-desa sekitar di Sungai Ambawang, sungai adalah jalur transportasi utama di masa lalu. Ia menghubungkan satu tempat dengan tempat lain. Menjadi urat nadi antara geliat kehidupan kota dan ‘pedalaman’. Di Dusun Teluk Lais sendiri, tempat kami menginap, mulanya hanyalah hamparan ladang tanpa pemukiman. Pemiliknya adalah orang-orang yang berasal dari daerah-daerah sekitar; Korek, Kuala Ambawang, Lingga, Cabang Kiri dan orang yang bermukim di daerah sekitar itu. Ketika sungai masih menjadi jalur transportasi utama, mereka membangun gubug-gubug kecil di sepanjang sungai sebagai tempat pemberhentian untuk menuju ladang. Lama-kelamaan gubug-gubug yang semula adalah tempat pemberhentian kemudian berubah menjadi tempat hunian.

Pada tahun 1966 misalnya, Nyirum Oreng, seorang Pasirah (pemangku adat di tingkat desa) bercerita, bahwa dulu rumah-rumah di tepi sungai itu dinding-dindingnya terbuat dari kulit kayu dengan atap dari rumbia. Warga satu-persatu mulai datang dan rumah panggung dibangun menghadap ke anak-anak sungai Kapuas.



Keterangan gambar: Sisa-sisa rumah yang berada di pinggir
Sungai Ambawang Dusun Teluk Lais (foto: I Nguh Suryawan).

Budaya Jalan Trans Kalimantan

Pola pemukiman semacam ini lambat-laun bergeser ketika pemerintah mulai membangun jalan Trans Kalimantan, di masa akhir rezim Orde Baru. Pembukaan jalan darat yang menjadi urat nadi baru bagi jalur ekonomi Pulau Kalimantan ini sekaligus mengubah pola konsentrasi ruang hidup masyarakat yang tinggal di sepanjang Sungai Ambawang. Dari yang semula rumah-rumah didirikan menghadap ke aliran sungai dan membelakangi ladang, pada tahun 90'an, posisi itu mulai berubah. Rumah yang semula menghadap ke sungai dan membelakangi ladang berbalik membelakangi sungai dan menghadap ke "jalan baru".

Dampak pembangunan jalan Trans Kalimantan ini, selain mengubah pola tata ruang warga setempat, yang paling tampak adalah membuat mobilitas orang dan barang menjadi semakin cepat. Warga Teluk Lais misalnya, yang dulu bila akan ke kota menghabiskan waktu satu hari penuh, bahkan hingga dua hari satu malam karena harus tinggal menginap di satu pemberhentian sungai, kini hanya memerlukan waktu 60 menit untuk sampai ke kota.

Jalan Trans Kalimantan tidak hanya menghubungkan antara desa dengan kota, tapi juga antara dua negara, Indonesia dan perbatasan Malaysia. Setiap menjelang malam hingga terbitnya pagi, jalanan ini tidak pernah sepi dari kendaraan. Bus-bus besar yang ditumpangi orang-orang hilir mudik di depan rumah, mengantar orang dari Indonesia menuju Malaysia dan demikian pula sebaliknya. Truk-truk pengangkut sawit, truk tangki minyak, dan kendaraan-kendaraan sepeda motor melintas di satu jalan yang sama.



Keterangan gambar: Rumah-rumah yang dibangun dengan menguruk rawa di Dusun Teluk Lais agar menghadap ke jalan raya (foto: I Ngurah Suryawan).

Berikut hasil pengamatan dan temuan kami tentang dampak pembangunan Jalan Trans Kalimantan di Desa Teluk Bakung, dan mungkin juga terjadi di seluruh daerah yang dilalui oleh jalan darat baru ini;

- Peradaban sungai mulai ditinggalkan dan beralih ke peradaban darat
- Tingkat konsumsi kebutuhan pokok dan sekunder meningkat
- Daya subsistensi menurun oleh penetrasi ekonomi pasar

- Pergeseran mata pencaharian
- Tingkat kecelakaan lalu lintas tinggi
- Masuknya industri ekstraktif (Sawit dan HTI)
- Pengeringan lahan basah (gambut) akibat kanalisasi oleh perusahaan
- Meningkatnya intensitas banjir ketika musim hujan dan kebakaran saat kemarau
- Kerap terjadi konflik yang melibatkan masyarakat, pengusaha dan aparat

Konflik Agraria

"Daripada kita mati kelaparan mending perang sekali," kalimat itu terucap dengan nada ringan dan spontan dari salah satu warga saat suatu kali ia bercerita tentang konflik yang pernah terjadi di dusun tetangga. Konflik itu dipicu oleh pengalaman salah-satu warga, yakni seorang kepala dusun, yang berurusan dengan hukum. Ia ditangkap oleh aparat karena dilaporkan oleh perusahaan lantaran melakukan penghadangan kendaraan milik perusahaan yang melintas. Namun aksi penghadangan itu juga bukannya tanpa alasan. Bermula ketika sang kepala dusun itu menuntut hak bagi hasil yang dulu pernah dijanjikan oleh perusahaan Palm Dale (perusahaan sawit) yang beroperasi di daerahnya.

Menurut cerita warga yang tinggal di dusun itu, dulu saat perusahaan masuk, pada tahun 2011-2013, mereka beroleh izin konsesi seluas 20.000 hektar, yang saat itu meliputi pemukiman 3000'an warga yang menghuni tiga empat dusun, yakni Dusun Lintang Batang, Dusun Loncek, Dusun Bawas Lestari dan Dusun Re'es. Dari luasan itu, lahan yang dapat dioptimalkan oleh perusahaan hanya sekitar separuhnya, 10.000 hektar. Pada tahun-tahun itu juga, ada program dari pemerintah tentang pembuatan sertifikat massal.

Wilayah yang menjadi bagian dari konsesi itu sebagian selanjutnya diplot oleh kelompok tani, diajukan untuk disertifikatkan – meski sebagian dari mereka tahu bahwa sebenarnya lokasi yang hendak diajukan untuk disertifikatkan itu merupakan wilayah konsesi perusahaan. Lalu diajukanlah wilayah yang sudah diplot itu untuk

disertifikatkan. Salah-satunya, kelompok tani di mana sang kepala dusun menjadi bagian dari kelompok tersebut.

“Jadi secara fisik lahan itu dimiliki oleh perusahaan, tapi secara administrasi dimiliki oleh petani,” kata warga. Karena tahu status lahan sebelumnya telah dimiliki oleh konsesi perusahaan, maka sebagian petani menyerahkan sertifikat yang telah didapatkannya. Namun tidak demikian dengan kelompok tani dari kepala dusun. Pihak perusahaan lalu mencoba melakukan negosiasi, mengajak kerja sama dengan pola inti plasma. Inti: 70% perusahaan dan 30% untuk plasma milik petani dengan kompensasi ganti rugi 300 ribu/ hektar. Dengan janji, bila tanaman sudah berusia di atas 5 tahun dan dapat dipanen, maka hasilnya akan dibagi sesuai perhitungan perjanjian inti-plasma.

Mendapat tawaran semacam itu, sang kepala dusun bersama kelompok taninya akhirnya bersedia untuk menyerahkan lahannya. Waktu itu, lahan yang diserahkan dari kelompok tani itu memiliki luas sekitar 300 hektar, sebagian berstatus sertifikat dan sebagian lagi Surat Keterangan Tanah (SKT).

Setelah berlalunya waktu, 5 tahun kemudian, warga yang dulu pernah dijanjikan oleh perusahaan akan mendapatkan pembagian hasil penjualan sawit ternyata tak kunjung menerima. Sementara di sisi lain, setelah 5 tahun berlalu, warga terus dipertontonkan pemandangan berupa kendaraan perusahaan yang keluar-masuk wilayahnya dengan mengangkut hasil panen sawit melintasi rumah mereka. Hal ini membuat sebagian warga jengkel. Akhirnya suatu hari si kepala dusun bersama kelompoknya menanyakan masalah itu kepada perusahaan. Akan tetapi jawaban yang diperoleh dari pihak perusahaan, katanya lahan inti-plasma belum bisa dipanen, selama ini yang dipanen itu adalah lahan konsesi milik perusahaan sendiri. Keterangan tersebut rupanya cukup memuaskan bagi warga yang setiap hari dipertontonkan hasil panen sawit.

Suatu hari di tahun 2017, karena akumulasi kejengkelan yang sudah memuncak, truk perusahaan yang melintas di depan rumah dihadang oleh kepala dusun. Aksi penghadangan tersebut membuat kepala dusun kemudian harus

berhadapan dengan aparat kepolisian karena pihak perusahaan melaporkannya. Atas peristiwa itu, ia sempat ditahan oleh pihak kepolisian selama berbulan-bulan. Ketika di pengadilan, kelompok petani dari si kepala dusun menuntut pihak perusahaan agar melakukan pengembalian lahan yang dulu pernah mereka berikan, seluas 300 hektar, ditambah dengan ganti rugi uang sejumlah 50 milyar rupiah. Di luar dugaan, ternyata pengadilan memenangkan tuntutan tersebut. Kepala dusun dan kelompoknya berhak mendapat pengembalian lahan seluas 300 hektar serta uang ganti rugi 5 milyar. Atas kemenangan itu, pihak pengadilan memberi waktu dua minggu bagi perusahaan dan koperasi untuk melakukan banding. Jika tidak melakukannya, maka kepala dusun bersama kelompok taninya berhak untuk mendapat ganti rugi pengembalian lahan dan sejumlah uang sebagaimana putusan pengadilan.



Aliran sungai di belakang pemukiman warga Dusun Teluk Lais yang kini mulai ditinggalkan (foto: Rio Belvage)

Selang beberapa hari sebelum tenggat waktu habis, tiba-tiba pihak dari perusahaan dan koperasi mengajukan banding ke tingkat provinsi. Akhirnya, ganti rugi pun tak kunjung diterima dan hingga sekarang proses hukum itu masih berjalan. Sejak itu si kepala dusun memang sudah dibebaskan dari ruang tahanan, tetapi status lahan sengketa yang seluas 300 hektar itu hingga kini masih disegel, tidak dapat diakses oleh kedua belah pihak. *Mangkrak*, dengan kondisi buah yang membusuk di tempat, demikian kata warga setempat.

Kompleksitas konflik pemanfaatan lahan di atas menjadi kian bertambah pelik ketika dari keterangan warga yang kami dapatkan, ternyata kasus itu ada juga yang berkelindan dengan garis kekerabatan. Ada satu warga di dusun, menjadi bagian dari kelompok tani si kepala dusun yang juga terlibat dalam penuntutan ganti rugi kepada perusahaan. Sementara anaknya, bekerja di perusahaan yang menuntut balik aksi warga (termasuk bapaknya) yang membuat si kepala dusun ditahan. Dalam garis kekerabatan, hubungan mereka adalah hubungan bapak dan anak. Namun persoalan sengketa lahan yang diselesaikan dengan jalan hukum formal itu membuat mereka berhadap-hadapan. Kenyataan ini menunjukkan betapa panjang konsekuensi yang diakibatkan lantaran tumpang-tindih tata-kelola dan pemanfaatan sumber-sumber agraria di tingkat tapak.

6. PENCIPTAAN DESA DESA SEPANJANG SUNGAI

Ada perbedaan yang cukup mencolok terkait fungsi sungai sebagai bagian dari kosmologi hidup masyarakat di Air Sugihan Sumatera Selatan dan di Sungai Ambawang Kalimantan Barat. Bila di Sungai Ambawang, sebagaimana diterangkan pada ulasan sebelumnya, fungsi anak sungai Kapuas sebagai jalur transportasi sudah mulai ditinggalkan sejak pembangunan jalan Trans-Kalimantan – yang selanjutnya mengubah pola pemukiman warga, maka tidak demikian halnya ketika kami tiba di Sumatera Selatan. Sampai saat ini, meskipun julukan “Venesia dari Timur” yang pernah dilekatkan semasa kolonial sudah pudar lantaran kondisi kota di atas air itu tidak lagi seperti dulu, terlebih di jantung Sumatera Selatan – Kota Palembang,

namun akses menuju daerah pedesaan di Sumatera Selatan masih sangat bergantung pada keberadaan transportasi jalur sungai.

Kamis siang, 11 Oktober 2018, di dermaga Benteng Kuto Besak, di samping Jembatan Ampera, kami Tim Peneliti dari Pusat Studi Kebudayaan Universitas Gadjah Mada menunggu perahu berangkat menuju jalur bernomor 27, dengan tujuan Desa Banyu Biru, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir.



Dermaga yang menjadi pusat lalu lintas transportasi sungai, di Sungai Musi. Menjadi penghubung antara kota dengan desa (foto: I Ngurah Suryawan)

Tergantung pada Sungai

Jalur sungai adalah alternatif jalan yang paling memungkinkan untuk kami bisa tiba ke tempat yang kami tuju, Desa Banyubiru Kecamatan Air Sugihan. Sebab, dari Kota Palembang ke tempat yang kami tuju, belum tersedia fasilitas angkutan umum bila kami menempuhnya melalui jalur darat. Angkutan umum hanya tersedia untuk jalur sungai. Sementara untuk jalur darat, hanya kendaraan pribadi saja yang melewati jalur darat. Itu pun jalur darat hanya mungkin dilalui jika musim kemarau.

Ketika masuk musim hujan pada bulan-bulan seperti ini (Oktober) akan sulit menggunakan jalur darat, karena jalanan yang masih berupa tanah liat yang menuju ke daerah yang kami tuju akan licin, penuh lumpur, sukar dilalui. Demikian keterangan yang kami peroleh dari orang-orang yang kami temui di Palembang.

“Terpencilnya” hubungan antara desa dan kota di Palembang ini terlihat misalnya, dari rata-rata setiap sopir kendaraan *online* yang kami tanyai. Sebagian besar dari mereka mengaku banyak yang belum pernah menjamah tempat yang akan kami tuju. Padahal jaraknya hanya berselang dua jam dari kota, dengan menggunakan jalur sungai. Barangkali oleh sebab itulah kenapa, bila dibandingkan dengan orang kota yang ke desa, lebih banyak mobilitas orang desa yang menuju ke kota.

Siang itu kami sudah berada di atas angkutan umum perahu, bersiap-siap hendak menuju Desa Banyubiru. Di dalam “Speed” yang gerah di tepi Musi, jauh di pinggiran sungai, anak-anak kecil berteriak tampak kegirangan melihat alat transportasi baru yang disediakan di kota, kereta MRT yang melintas di ketinggian. “Keretaa.. keretaa..” teriak anak-anak itu. Ya, jalur trem kereta itu memang baru saja dibangun di Kota Palembang, untuk memudahkan mobilitas orang-orang kota. Satu pemandangan yang terasa kontras bilamana dibandingkan dengan kelangsungan pembangunan infrastruktur sungai orang-orang desa di kabupaten sekitar.

Anak-anak kecil yang kegirangan ketika melihat kereta dari kejauhan itu, bersama para penumpang lain – termasuk kami – sudah berjam-jam menunggu angkutan kapal di bawah terik udara siang, sementara perahu tak kunjung berangkat karena masih menunggu kursi terisi penuh. Tentu lain dengan kondisi kereta ber-Ac, dengan biaya angkutan yang juga jauh lebih terjangkau bila dibandingkan dengan ongkos *Speed*. Dengan uang sepuluh ribu, kereta itu akan mengantar penumpang hingga ke tempat tujuan. Sementara dengan perahu, para penumpang perlu merogoh kocek setidaknya 90 ribu rupiah satu kali jalan, agar mereka bisa sampai ke tempat yang dituju.

Siang itu, jadwal perahu yang kami tumpangi mestinya berangkat pukul satu, namun baru mulai melaju pukul 2 siang. Jadwal *molor* hingga satu jam karena sang

sopir perahu menunggu kursi dipenuhi oleh penumpang. Dalam satu hari, hanya ada satu buah perahu yang menuju ke Jalur bernomor 27 – tempat yang akan kami tuju, di Kecamatan Air Sugihan. Yakni pukul 12 siang dari Kota Palembang ke desa, dan dari desa ke Palembang pada pukul 6 pagi. Si pemilik perahu sendiri, ia berasal dari desa, tinggal di desa, memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga besar pemilik perahu (‘penguasa jalur sungai’ – demikian salah satu warga di Banyubiru menyebut pemilik perahu tersebut) di daerah Sungai Sugihan dan Sungai Baung, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Kursi akhirnya terisi penuh. Perahu yang baru berangkat pada pukul dua siang itu, melintas di bawah Jembatan Ampera, membawa kami mengarungi anak-anak Sungai Musi yang berkelok dan bercabang. Dan semakin masuk ke dalam, semakin warna air sungai keruh kecoklatan. Di tengah perjalanan, sesekali kami berpapasan dengan perahu tongkang besar yang mengangkut berton-ton kayu akasia. Kayu-kayu ini, katanya didatangkan dari luar daerah, untuk diolah di pabrik kertas terbesar di Asia, *OKI Pulp and Paper*.



Sebagian besar pemukiman di daerah Sungai Sugihan adalah desa-desa buatan. Dibangun pada tahun 80'an dengan mendatangkan orang-orang dari Pulau Jawa untuk mengolah 'tanah-tanah kosong' (lahan gambut) yang dikelilingi anak Sungai Musi. Daerah yang kini dijumpai sebagai pemukiman itu, mulanya adalah belantara hutan.

Dari satu dari sedikit orang Palembang yang menghuni daerah ini, kami mendapat cerita. Ia bercerita bahwa dulu ia adalah satu dari 20 orang yang dipekerjakan oleh PT.Sakna Nusantara untuk melakukan pemetaan dan membuka kawasan ini saat dulunya masih berupa hutan. Waktu itu pendatang dari Pulau Jawa belum sampai di daerah ini. Tahun 1978, ia bersama 20 orang datang ke wilayah ini, bekerja pada PT.Sakna Nusantara yang berkantor pusat di Jakarta.

Barulah kemudian pada tahun 1982, orang-orang Trans dari Jawa didatangkan ke sini. Dulunya, daerah yang kini dikenal dengan Banyubiru Kecamatan Air Sugihan ini dijuluki 'Petala Bumi', diambil dari nama sebuah perusahaan kayu yang pada saat itu beroperasi di daerah ini. Kemudian nama itu berganti menjadi Banyubiru setelah rombongan 'Orang-orang Trans' dari Jawa tiba di daerah ini. Yang memberi nama pada saat itu adalah seorang kyai dari Jawa Barat. Katanya, nama ini terinspirasi dari nama desa yang sama yang berada di Jawa.

Pada saat itu kepala desanya bernama Hanopo. Rombongan pertama yang didatangkan dari Jawa sejumlah 132 KK, mengisi petak-petak yang membentuk garis balok memanjang di sepanjang tepi sungai. Kemudian menyusul selanjutnya dengan jumlah yang sama. Lahannya sendiri saat itu mulanya hanya diperuntukkan khusus bagi orang Jawa. Orang asli Palembang seperti dirinya misalnya, ia bisa sampai memiliki lahan di sini adalah dari hasil mengganti rugi milik Orang-orang Trans yang ditinggalkan. Dulu, tidak semua warga Trans dari Jawa yang pindah ke sini betah menghuni tempat barunya. Sebagian dari mereka ada yang tidak kerasan dan memilih untuk kembali pulang. Pada periode pertama Orang Trans, pemerintah menanggung kebutuhan hidup dengan memberikan bantuan sembako selama 20 bulan, lalu

diperpanjang 6 bulan. Hingga kemudian, bantuan berhenti dan mereka harus beradaptasi dengan kondisi alam yang berbeda dengan kondisi di Jawa.



Keterangan gambar: Penciptaan jalur-jalur pemukiman para transmigran membentang sepanjang Sungai Musi (foto: I Ngurah Suryawan)

Karena tidak memiliki pengalaman bercocok-tanam di lahan gambut, sejak tidak mendapat bantuan lagi dari pemerintah, banyak warga yang saat itu memilih untuk kerja logging. Kerja balok, menebang pohon-pohon di hutan yang ada di dekat tempat tinggal mereka, bahkan ada yang sampai kerja balok jauh dari tempat tinggal. Pada masa-masa awal itu, tidak ada dari mereka yang mengolah tanah (bertani), sebab jenis tanah yang berbeda dengan kampung halaman mereka di Jawa. Di tempat baru mereka, tanahnya adalah tanah gambut, dengan rawa dimana-mana.

Transisi pola matapencaharian ini kemudian beralih saat ketersediaan kayu di hutan sudah mulai habis. Banyak dari warga yang kemudian merantau ke Pulau Bangka untuk bekerja di lokasi penambangan timah. Sebagian, ada juga yang bekerja

di perkebunan-perkebunan sawit dan karet di luar daerah. Para perantau inilah yang kemudian membawa atau memperkenalkan tradisi berkebun karet dan sawit. Orang-orang Trans dari Jawa ini mendapatkan ketrampilan baru di 'perantauan kedua'. Ketika kembali pulang ke kampung halaman, satu-persatu dari mereka kemudian mulai mencoba untuk mempraktikkan ketrampilan berkebun yang didapatkannya di perantauan. Di luar dugaan, hasil dari berkebun itu ternyata cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sejak mereka bisa hidup di tanah sendiri, di tempat tinggal barunya, sejak itulah tradisi merantau di kalangan 'Orang-orang Trans' mulai berkurang. Kini nyaris semua warga masing-masing memiliki kebun sawit dan karet di tempat tinggalnya, selain tanaman padi, buah-buahan, dan sumber ekonomi baru: sarang walet.

Krisis Air

Satu dari sedikit orang Palembang yang pertamakali tiba dan ikut membuka lahan di daerah ini bercerita. Pada masa awal dulu, air sungai yang menghubungkan desa ini dengan sungai besar Musi hingga menuju ke kota, warnanya belum sekeruh seperti sekarang. Menurut cerita, dulu warnanya masih merah jernih, khas jenis warna air di wilayah tanah bergambut. Sungainya sendiri pun belum selebar seperti sekarang. Sungai-sungai anak Kapuas itu diperlebar supaya perahu-perahu berukuran besar bisa masuk ke daerah ini.

Dulu, kebutuhan air warga dapat tercukupi dari air hutan. Lain dengan sekarang. Dulu bila tiba musim kemarau, biasanya ada orang jual air, air yang berasal dari sungai Musi yang waktu itu kondisinya belum sekeruh seperti sekarang. Saat mulai masuk PT.Akasia dan terjadi kebakaran besar berkali-kali di hutan yang tidak jauh dari pemukiman Trans, kondisi air mulai berubah. Perubahan ini semakin dirasakan oleh warga setelah PT tersebut melakukan kanalisasi.

Warga yang semula biasa menggantungkan kebutuhan air sehari-hari dari hutan, kemudian mesti mengandalkan air hujan untuk kebutuhan air minum. Dan belakangan, sekitar dua tahun terakhir ini, warga mulai diingatkan supaya tidak

mengonsumsi air hujan, karena katanya udara di sekitar sudah tercemar oleh limbah pabrik, sehingga air yang menetes dari langit itu menjadi tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Bahkan, kata warga di tempat kami menginap, sambil heran berkata, “Masak anak kecil sudah ada yang kena kanker darah?”

Kini, ketika pemenuhan kebutuhan akan air bersih kian buntu, berlangsung komodifikasi air sebagai jalan keluar. Sebagian warga yang terbilang mampu dalam ekonomi, mesti merogoh kocek untuk membeli air galon isi ulang untuk kebutuhan air minum. Harganya 10ribu/galon. Penjualnya berasal dari desa tetangga. Biasanya para penjual ini akan berkeliling di jalanan desa menjajakan air dagangannya. Sementara bagi warga dengan ekonomi yang kurang mampu, mau tak mau mereka menggunakan sumber air dari desa, yakni air yang telah tercemar dan tidak layak untuk dikonsumsi. “Kondisi air di desa saat ini,” kata warga, “kalau tiba musim hujan, bisa bikin mati padi di sawah”. “Untuk cuci muka pun, pedas di mata”, lanjutnya.



Keterangan gambar: Warna air sungai yang coklat umum
dijumpai di daerah jalur-jalur transmigrasi (foto: Rio
Belvage)

Yogyakarta - Pontianak – Palembang, Oktober - November, 2018

DAFTAR PUSTAKA

- Michael R.Dove. 1985. “Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi”. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Murray Li, Tania. 2002. “Keterpinggiran, Kekuasaan, dan Produksi: Analisis Terhadap Transformasi Daerah Pedalaman”, dalam “Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia”. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- _____. 2012. “The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan dan Pembangunan di Indonesia”. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
- Iwan Meulia Pirous, “Kerentanan akibat Larangan Bakar Hutan”, Opini Kompas, 29 Maret 2018.
- Iskandar, Johan. 2016. “Etnobiologi dan Keragaman Budaya di Indonesia” dalam *Jurnal Umbara: Indonesian Journal of Anthropology*, Jurusan Antropologi Universitas Padjajaran Bandung, Vol 1 (1) Juli 2016.
- Rahman, Noer Fauzi. 2015. “Memahami Reorganisasi Ruang dalam Perspektif Politik Agraria” dalam *Jurnal Bhumi STPN (Sekolah Tinggi Pertanian Nasional) Vo.1 No.1 Mei 2015*